

GEREJA DAN KEMISKINAN**Studi Etika Kristen terhadap Sikap Gereja dalam Mengurangi Kemiskinan Struktural Menurut Pemikiran Gustavo Gutierrez****Tri Endro Panjaitan, Manimpan Hutasoit, Fernando Sibarani**

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Bandar Baru

Abstrak

Kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks. Gereja sebagai persekutuan orang percaya memiliki tanggung jawab moral untuk berperan mengurangi angka kemiskinan sebagai wujud mewartakan *syalom* Allah di tengah-tengah dunia. Kehadiran gereja diperlukan untuk memberikan pembebasan kepada jemaat yang mengalami kemiskinan akibat dari struktur yang tidak adil. Gereja dipanggil untuk melakukan kebaikan sebagai wujud iman akan Allah, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sang lain atau sesama. Dalam menyikapi kemiskinan struktural, penulis menawarkan solusi dari pemikiran Gustavo Gutierrez sebagai pisau bedah. Gutierrez berpendapat gereja dalam konteks kemiskinan struktural harus menyatakan sikap dengan memberikan pembebasan dari ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan. Gutierrez sendiri yakin bahwa gereja untuk orang miskin (Church for the poor) adalah dasar bagi keberadaan gereja itu sendiri dan basis teologi ketika berefleksi kritis.

Kata kunci: Gereja, kemiskinan struktural, Gusatavo Gutierrez, ketidakadilan, pembebasan

I. Pendahuluan

Menyoal tentang kemiskinan struktural muncul pertanyaan. Apakah mengurangi kemiskinan merupakan hanya tugas negara saja? Tentu tidak! Masyarakat atau gereja adalah bagian dari negara, oleh karena itu masyarakat atau gereja juga harus mengambil peran dalam mengurangi persoalan kemiskinan. Dalam studi etika dalam menyelesaikan masalah ada 3 pertanyaan kritis, yaitu: *Pertama*, apa yang harus kita lakukan dalam situasi konkret yang kita hadapi. *Kedua*, bagaimana kita membentuk pola hubungan atau relasi kita dengan orang lain dalam menghadapi situasi/masalah? *Ketiga*, akan menjadi manusia seperti apakah kita di tengah masalah tersebut?⁹⁴

Gereja sebagai institusi agama yang merupakan institusi sosial di dalam masyarakat, juga harus memberikan dampak serta kontribusi yang mampu mengentaskan segala bentuk kemiskinan di dunia ini. Gereja dan ajarannya dituntut untuk dapat melibatkan diri terhadap permasalahan-permasalahan sosial, salah satunya dengan mengaplikasikan ajaran-ajarannya secara konkrit di tengah realitas sosial yang terjadi.

Gustavo Gutierrez mengatakan bahwa pembebasan merupakan sebagai karya penyelamatan. Gutierrez berangkat dari realitas sosial yang ia alami. Realitas kemiskinan tidak memberikan tanda kehidupan di Amerika Latin. Realitas sosial yang terjadi bukan hanya menyangkut masalah sosial saja, tetapi juga menjadi masalah iman.⁹⁵ Ada hal yang dikritisi oleh Gutierrez dalam berteologi, yakni gereja seringkali hanya menangani hal-hal yang religius saja, sedangkan kemasyarakatan seperti

⁹⁴ Bahan Ajar Mata Kuliah Etika Kristen, 2020

⁹⁵ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez*, (Yogyakarta: Kanisus, 2002), h. 18.

kemiskinan adalah mmandangnya menjadi masalah negara (dunia).⁹⁶ Kemiskinan merupakan masalah profan yang tidak merupakan bagian dari kehidupan beragama, sehingga sering sekali kemiskinan dianggap sebagai sebuah tanggung jawab dari pemerintah dan bukan gereja⁹⁷

Tom Jacob, mengatakan, bahwa gereja adalah senasib dengan dunia. Gereja merupakan bagian dari dunia. Gereja tidak kelihatan secara fisik (gedung), tetapi gereja juga sebagai orang-orang yang mau membangun persekutuan yang bertolak dari nilai religius, serta sebagai aspek sosial. Gereja tidak hanyaewartakan Injil, tetapi juga berperan positif dalam pembangunan kehidupan manusia.⁹⁸ Gerrit Singgih juga berbicara hal yang sama, tentang gereja, dimana gereja dipahami sebagai tubuh Kristus. Gereja sebagai tubuh Kristus, berarti kita sebagai umat-Nya adalah bagian tubuh dan tidak pernah terlepas dari tubuh. Artinya, ada ikatan antara Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Gereja sebagai tubuh Kristus merupakan tanda keselamatan Allah yang secara konkrit perlu dinyatakan di tengah dunia.⁹⁹

II. PEMBAHASAN

1. Kemiskinan adalah Realitas Sosial: Upaya Mencari Dasar Pijak

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi pokok permasalahan yang perlu untuk diperhatikan secara terus-menerus. Para ahli ilmu-ilmu sosial umumnya berpendapat bahwa sebab utama yang melahirkan kemiskinan ialah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sistem ekonomi ini tercermin dalam berbagai pranata yang ada dalam masyarakat tersebut, yaitu suatu sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terorganisasi untuk usaha-usaha penentuan kebutuhan-kebutuhan sosial utama yang dirasakan perlunya dalam masyarakat.¹⁰⁰

Di dalam *Federation of Asian Bishop Conference* (FABC) yang merupakan federasi konferensi-konferensi Uskup Asia menegaskan dalam dokumen I FABC mengenai pemaknaan tentang miskin:

“Miskin bukan dalam nilai-nilai, kualitas maupun potensi-potensi manusiawi. Miskin berarti bahwa mereka dilecuti dari kemungkinan mencapai harta dan sumber-sumber material yang mereka perlukan untuk bisa hidup secara sungguh sebagai manusia. Dikatakan dilecuti, karena mereka hidup dalam penindasan, yakni di bawah struktur-struktur sosial, ekonomi, dan politik yang dalam dirinya sudah mengandung ketidakadilan.”¹⁰¹

Jika dilihat dalam pemaknaan kemiskinan dalam dokumen I FABC, bahwa penindasan dapat menjadikan manusia hidup miskin. Artinya, disini kehadiran manusia adalah untuk menguasai orang lain untuk kepentingan pribadi. Sama seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbs manusia menjadi Serigala bagi sesamanya. Artinya siapa yang kuatlah yang menjadi pemenang.

⁹⁶ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez*, h. 19.

⁹⁷ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez*, h. 19.

⁹⁸ Tom Jacob, dkk, *Gereja dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h. 23.

⁹⁹ Emmanuel Gerrit Singgih, *Bergereja, Berteologi dan Bermasyarakat* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1997), h. 8.

¹⁰⁰ Akibat sistem ekonomi yang terjalin dalam berbagai pranata tersebut memberikan corak pada pola kehidupan ekonomi yang menghasilkan adanya ketidakmerataan ekonomi yang dirasakan oleh warga masyarakat tersebut dapat mencapai pola kehidupan ekonomi yang bersumber pada sistem ekonominya. Lih. H. Abu Asmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Semarang: Rineka Cipta, 1991), h. 328.

¹⁰¹ C. Putranta, *Gereja Kaum Miskin dalam Konsili Vatikan II dan Dokumen Federasi Konferensi Unskup-Uskup Asia* dalam Tulisan J.B. Banawiratma, *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 113.

Persoalan kemiskinan, dalam semangatnya Gutierrez, teolog pembebasan Amerika Latin memformulasikan pemahamannya tentang miskin, kemiskinan, dan orang miskin sebagai resultan atau hasil dari penindasan dan penetrasi ideologis yang dilakukan oleh para penguasa. Menurutnya, kaum miskin merupakan hasil dari sebuah sistem di mana kita hidup dan bertanggung jawab. Mereka disingkirkan oleh dunia sosial dan kultural kita. Mereka adalah kaum yang ditindas, proletar yang dihisap, yang hasil kerja mereka dicuri dan kemanusiaan mereka diinjak-injak. Oleh karena itu, kemiskinan bukan suatu panggilan untuk tindakan perorangan yang murah hati, melainkan suatu tuntutan untuk kita dalam membangun sebuah tatanan sosial yang baru.¹⁰²

Gutierrez mengatakan, di tengah sejarah, ketidakadilan, penindasan, perpecahan, konfrontasi, dan konflik, harapan pembebasan hadir. Perjuangan pembebasan dari struktur-struktur yang menindas bukan sekedar dengan mengetahui adanya eksploitasi dan alienasi kemanusiaan, melainkan juga bertindak diterangi oleh iman, agar setiap orang mencapai kehidupan yang bermartabat dan mengubah nasibnya. Gutierrez juga menegaskan bahwa di dalam Kristus, proses pembebasan yang komprehensif, terkait dengan relasi-relasi di dalam masyarakat yang seras dengan perbudakan dan diskriminasi, dapat terjadi secara total dan radikal.¹⁰³

Pandangan yang disampaikan oleh Gutierrez berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh kaum konservatif. Golongan konservatif, menyakini bahwa penyebab dari kemiskinan bukan disebabkan oleh struktur sosial di dalam masyarakat melainkan, karena kebodohan dan kemalasan. Masalah kemiskinan sebagai kesalahan pada orang miskin sendiri. Akibatnya mereka tidak memandang masalah kemiskinan sebagai masalah yang serius, karena mereka merasa bahwa penyebab kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri.¹⁰⁴ Dari pandangan golongan konservatif ini dapat menyebabkan kemasabodohan, matinya nalar dan hati nurani sehingga tiadanya motivasi, yang kesemuanya itu menjadi penyebab kemiskinan.

Dengan pemahaman seperti ini, jawaban untuk penanggulangan kemiskinan terletak pada usaha-usaha pemberian pendidikan, keterampilan, dan kesehatan bagi masyarakat, tanpa menggugat atau mengutak-atik sistem sosial-politik, yang besar kemungkinan turut menyumbang bagi terciptanya kebodohan dan kemalasan dalam masyarakat, seperti tertutupnya akses bagi mereka untuk mendapatkan kesempatan pendidikan dan menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

2. Perihal Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah buatan manusia, dari manusia dan terhadap manusia pula. Kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur (buatan manusia), dapat mencakup baik struktur ekonomi, politik, sosial dan kultur. Sistem sosial ekonomi yang berlaku memungkinkan terkonsentrasinya kekuasaan dan sumberdaya pada pihak tertentu, yang menghambat peluang pihak lain untuk mengakses dan menggunakan sarana ekonomi dan fasilitas yang sebenarnya tersedia bagi mereka¹⁰⁵

¹⁰² James B Nickolof, *Gustavo Gutierrez: Essential Writings*, (London: SCM Press, 1996), h. 18.

¹⁰³ Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation*, (London: SCM Press, 2001), h. 100.

¹⁰⁴ Suryawasita, *Analisis sosial* dalam Tulisan J.B. Banawiratma, *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 17.

¹⁰⁵ Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan. Nala Cipta Litera bekerjasama Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan*, (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009), h. 10

Menurut Soetandoyo yang dikutip Tri Wahyu Rajekiningi, kemiskinan struktural disebabkan kondisi struktur atau tatanan hidup yang tidak menguntungkan. Dikatakan tidak menguntungkan, karena tatanan yang dibentuk hanya berpihak kepada orang tertentu (penguasa). Sehingga, hal tersebut melanggengkan kemiskinan dalam masyarakat.¹⁰⁶ Magnis Suseno mengartikan kemiskinan struktural sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang paling kasar dan dasariah serta penanggulangannya merupakan suatu kewajiban serius, sebab struktur-struktur yang menghasilkan kemiskinan itu tidak dalam sekejap dapat diubah.¹⁰⁷ Lalu Gutierrez menggambarkan kemiskinan struktural bahwa mereka adalah kaum tertindas, proletar yang dihisap, yang hasil kerja mereka dicuri dan kemanusiaan mereka diinjak-injak. Oleh karena itu, kemiskinan bukan suatu panggilan untuk tindakan perorangan yang murah hati, melainkan suatu tuntutan kita dalam membangun sebuah tatanan sosial yang berbeda”.¹⁰⁸

Maka semakin jelas bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya struktur sosial tertentu, yang atas kekuatannya sendiri tak akan mampu menguasai atau mengubah struktur itu. Seseorang atau sekelompok masyarakat yang terjebak oleh struktur itu, sebagai orang miskin akan sulit membebaskan dirinya dari kemiskinan.¹⁰⁹ Untuk menambah gambaran kemiskinan struktural, Franz Magnis Suseno memperlihatkan bahwa kemiskinan struktural pada umumnya bukanlah akibat kemiskinan yang alamiah (misalnya: tidak adanya cukup ikan, atau orang yang memang kurang minat pada ikan), melainkan akibat pembagian hasil pekerjaan yang timpang yang disebabkan oleh suatu ketidakadilan struktur dalam pembagian kekayaan nasional dan hasil pekerjaan masyarakat sebagai keseluruhan. Bahkan kemiskinan struktural bukan saja persoalan ketimpangan, melainkan akibat dari struktur ekonomi yang ditunjang oleh struktur kekuasaan politik dan kebudayaan langsung secara terbuka dan bersifat eksploitatif.¹¹⁰

Persoalan kemiskinan struktural dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif, politik, dan sosial budaya.

a. Sistem Ekonomi Kapitalis yang Eksploitatif

Sistem ekonomi kapitalis menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Pada sistem ekonomi ini, asumsi dasarnya adalah manusia mengejar kepentingan pribadinya.¹¹¹ Di dalam sudut ilmu ekonomi, sebagaimana definisi Soemardjan, kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena adanya struktur sosial masyarakat tertentu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.¹¹² Sebab utama kemiskinan dalam ekonomi dikarenakan adanya corak pada pola kehidupan ekonomi yang tidak merata/kesenjangan, sehingga masyarakat tidak mencapai pola ideal yang bersumber dari sistem ekonominya.¹¹³

¹⁰⁶ Tri Wahyu Rajekiningi, “Indifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural” dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, Nomor 1, Juni 2011*, h. 34

¹⁰⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 443

¹⁰⁸ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez*, h. 52

¹⁰⁹ Rukmadi Warsito, *Birokrasi dan Kemiskinan di Indonesia*, (Salatiga: Bina Darma, 1993), h. 29

¹¹⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, h. 441-442

¹¹¹ H. Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Malang: Rineka Cipta, 1991), h. 305

¹¹² Selo Soemardjan, dkk (ed), *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*, (Jakarta: Sangkala Pulsar, 1980), h.5

¹¹³ Hartono dan Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 316

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Karl Marx yang dikutip oleh Suryawasita bahwa: "Institusi ekonomilah yang merupakan landasan dimana institusi-institusi lain berdiri. Dengan kata lain semua institusi lainnya dipengaruhi dan ditentukan oleh institusi ekonomi dan tidak memiliki pengaruh timbal balik".¹¹⁴

b. Politik

Rendahnya partisipasi pendidikan politik pada masyarakat yang mengakibatkan munculnya kemiskinan dalam bidang politik bagi kaum miskin, berdampak pada rendahnya pengaruh kaum miskin terhadap kebijakan negara. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyak kebijakan pemerintah dibuat yang sering merugikan kaum miskin,¹¹⁵ sehingga membuat mereka tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, terhambat dalam memperoleh bantuan hukum, termasuk di dalamnya menuntut upah yang layak atau menolak suku bunga uang pinjaman. Dalam hal ini juga, masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah di dalam mengambil keputusan tentang pelayanan dan bantuan yang seharusnya diberikan kepada golongan yang lemah, dan tidak berdaya terhadap ancaman hukum atau denda atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan kelompok masyarakat yang hidup miskin, sementara kaum elit politik cenderung tidak berpihak kepada kelompok masyarakat yang demikian.¹¹⁶

c. Sosial Budaya

Ketidakadilan dalam interaksi sosial akan mengakibatkan kemiskinan struktural. Kondisi keadilan yang diinginkan berhubungan dengan masalah bagaimana terselenggaranya tata hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok dalam tatanan sosial sehingga konsepsi tentang keadilan senantiasa berakar pada kondisi masyarakat yang diinginkan tersebut.¹¹⁷ Jika dilihat dari sudut pandang jumlahnya, struktur sosial yang diciptakan secara vertikal oleh penguasa atau pemodal besar hanya lah sebagian kecil dari seluruh komunitas. Hal ini ditandai terjadinya semacam pergeseran pola hubungan antara golongan penguasa dengan mereka yang termasuk golongan miskin. Pola yang dibentuk oleh struktur sosial itu merupakan suatu bentuk korporasi tertutup yang cenderung mempertahankan hak-hak sosial golongan atas terhadap golongan bawah. Sesuai dengan sifatnya yang tertutup, sebagaimana yang terlihat di dalam tradisi yang selalu membagi hak dan prioritas yang hanya sekelompok saja atau hanya dengan para penguasa saja.¹¹⁸

Secara sosial golongan tertentu yang tidak mendapat hak sosialnya telah dirampas oleh golongan atas, sehingga kelompok tertentu tidak dapat mengembangkan kemanusiaannya secara utuh.¹¹⁹

¹¹⁴ J.B. Banawiratma, *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), h. 12

¹¹⁵ Merphin Panjaitan, *Memberdayakan Kaum Miskin*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), h. 14

¹¹⁶ Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta: LP3S, 1983), h. 147

¹¹⁷ Muhammad Kmustofa dan Mulyana W Kusuma, "Ketidakadilan Struktural dan Kedaulatan Hukum" dalam Alfian, dkk, *Kemiskinan Struktural*, (Malang: YIS, 1980), h. 132

¹¹⁸ Hotman Siahaan, "Struktur Sosial dan Kemiskinan Petani", *Ibid.*, h. 111

¹¹⁹ Franz Magnis Suseno, "Keadilan dan Analisis Sosial" dalam J.B Banawiratma (peny), *Kemiskinan dan Pembebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 38

3. Peran Etis Gereja dalam Menyikapi Kemiskinan

Mengacu pada semua pemaparan yang sudah membangun basis argumentasi kita bagi kepentingan perjuangan kaum miskin, sangatlah jelas bagaimana seharusnya gereja mengambil posisi dan peranannya di tengah kehidupan masyarakat miskin.

Gereja atau *ekklesia* adalah milik Tuhan. Gereja sebagai *civitas pilgrima* artinya, mendengarkan sebuah panggilan bukan untuk menikmati hak istimewa tetapi untuk menjalankan tugas istimewa. Gereja tampil sebagai persekutuan egoistis kalau ia hanya ada sebagai persekutuan yang menikmati panggilan. Gereja disebut sebagai persekutuan jika dapat memperdengarkan dan menjalankan panggilan. Gereja bukan hanya umat yang sedang bergerak menuju kehidupan baru, tetapi, mendapat mandat untuk menolong sesama manusia untuk menyeberang¹²⁰

Gereja tampil sebagai persekutuan untuk menyatakan hubungan Allah di dalam Kristus dengan manusia. Istilah ini digunakan dalam Filipi 1:7: “*Aku mengucapkan syukur kepada Allahku karena persekutuan-Mu (koinonia) sampai sekarang ini*”. Gereja sebagai tubuh Kristus merupakan persekutuan orang percaya, yaitu orang-orang yang telah dipanggil keluar (*ekklesia*). Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang menjawab panggilan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus. Dapat dikatakan bahwa Kristus adalah sentral bagi gereja. Kristus adalah Kepala gereja dan gereja adalah Tubuh Kristus. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang menjawab panggilan karya penyelamatan Allah di dalam Kristus.¹²¹ Kehadiran dan keberadaan gereja di dunia untuk memberitakan syalom Allah melalui partisipasi aktif dalam tujuan penyelamatan Allah terhadap manusia dan dunia.¹²²

Menurut Bonhoeffer yang dikutip Hans A. Harmakaputra, gereja mencerminkan relasi antara Allah dengan manusia. Gereja adalah komunitas manusia yang berjumpa dengan Allah. Sehingga, keberadaan dirinya membangun relasi dengan sesama manusia. Dengan kata lain, seseorang mesti menjumpai orang lain sebagaimana dirinya dilihat oleh Kristus. Dengan demikian, gereja adalah sebuah komunitas melalui Kristus dan di dalam Kristus. Melalui Kristus, Gereja yang kudus tidak lagi diselubungi oleh egonya sendiri, karena itu, mampu mengenal dan merengkuh pribadi yang lain¹²³

Dalam hal ini, gereja dapat terbuka terhadap konteksnya yang ia hadapi. Gereja harus senantiasa mencair (*liquid church*) sehingga, gereja dapat selalu bergerak senantiasa menuju masa depan.¹²⁴ Menurut Piter Ward yang dikutip oleh Joas, gereja cair bersifat responsif terhadap situasi yang dihadapi meskipun berada dalam tekanan. Selalu bersedia menyambut semuanya itu, karena ini merupakan hakikat kehidupan. Gereja cair tidak melindungi umat, melainkan marangkul mereka,

¹²⁰ Ebenhaizer Nuban Timo, *Menuju Gereja yang Mandiri dan Terbuka, Wacana bagi Pembaharuan Jemaat* (Kupang: Gita Kasih, 2009), h. 4

¹²¹ G.C. Niftrik dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1967), h. 272

¹²² W. Andreas, *Manajemen Gereja*, (Bandung: Bina media Infomasi, 2010), h. 25

¹²³ Asosiasi Teolog Indonesia dalam buku, *Ziarah Iman Ziarah Politik: Sketsa-sketsa Teologi Politik Kekinian*, Tim Peny. Abraham S. Wilar, dkk, (Jakarta: Grafika KreasIndo, 2020), h. 211

¹²⁴ Joas Adiprasetya, “Gereja Pengembara, Gereja Sahabat”, dalam Meitha Sartika & Hizkia A. Gunawan, *Ecclesia In Transitu Gereja di Tengah Perubahan Zaman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), h. 2

mengakui rasa sakit dan penderitaan serta kesedihan dan kegelisahan. Dalam hal ini, gereja merujuk kepada sikap yang membangun persahabatan di tengah konteks yang dihadapi.¹²⁵

Secara etis Gutierrez memahami gereja sebagai persekutuan yang melayani umat. Gereja memiliki peran ganda yang terus memainkan perannya di tengah-tengah penderitaan rakyat. Bagi Gutierrez pemahaman gereja atas realitas konteks sangat diperlukan. Teologi bukanlah suatu pemikiran yang kaku dan beku, tetapi harus cair dengan setiap permasalahan sedang dihadapi¹²⁶

Menurut Gutierrez Teologi Pembebasan adalah dasar pijak yang menuntun gereja dalam upaya merumuskan strategi dalam mengentaskan kemiskinan dari struktur yang tidak adil yang disebabkan oleh para penguasa. Adanya konteks ketidakadilan ini, Gutierrez menuntut adanya pembebasan dalam memerangi kemiskinan. Teologi pembebasan hadir sebagai praksis dalam membangun wacana tentang Allah yang di mana Allah selalu hadir untuk menyelamatkan umat dari setiap penderitaan.¹²⁷ Bagi Gutierrez, gereja adalah tempat untuk berefleksi kritis di dalam komunitas. Pandangan ini, menjadi sebuah pilihan gereja untuk memihak kepada masyarakat miskin dan melibatkan diri dalam perjuangan untuk membebaskan mereka.¹²⁸

Gutierrez menekankan sifat politik dari pelayanan Kristus. Kristus tidak tergabung dalam gerakan orang Zelot Yahudi, namun Ia terus menerus melawan pihak penguasa dan struktur-struktur kekuasaan politik pada zaman-Nya, di mana Ia disalibkan juga oleh kuasa-kuasa politik tersebut. Kristus menyerang akar ketidakadilan sosial, yang berarti bahwa Ia mengaitkan pembebasan masa kini dengan sejarah keselamatan yang bersifat revolusioner, kekal dan universal. Perkara-perkara politik tercakup di dalam kekekalan dan karya Kristus bersifat politik justru karena menyelamatkan manusia. Meneladani sifat pelayanan Kristus di atas, adalah tidak mungkin bagi gereja untuk hidup di dalam Injil jikalau terpisah dari keterlibatan politik, karena pesan Injil itu sendiri mempunyai dimensi politik yang tidak dapat dihindarkan.¹²⁹

Dalam *A Theology of Liberation* Gustavo Gutierrez, ia menekankan bahwa program politis yang terkait dengan gerakan pembebasan harus berpusat pada sebuah spiritualitas pembebasan. Gutierrez, tentunya sadar akan bahaya-bahaya mengabsolutkan usaha-usaha politis. Gutierrez berpendapat bahwa hidup kekristenan harus dipenuhi dengan sebuah pemahaman yang hidup tentang tahu berterima kasih. Persekutuan dengan Tuhan dan dengan semua umat manusia lebih dari segalanya adalah sebuah pemberian. Partisipasi kita dalam ibadah, dia katakan adalah sebuah kegiatan waktu luang, sebuah waktu yang terbuang, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan berada di luar kategori yang berguna dan yang tidak berguna. Dalam persekutuan ibadah kita dengan Allah, Gutierrez mengatakan pada kita, kita melihat ke depan ke sebuah masa depan indah saat kita mendengar, dia katakan sebagai undangan untuk berpartisipasi dalam sukacita eskatologis.¹³⁰

¹²⁵ Joas Adiprasetya, "Gereja Pengembara, Gereja Sahabat", dalam Meitha Sartika & Hizkia A. Gunawan, *Ecclesia In Transitu Gereja di Tengah Perubahan Zaman*, h. 2

¹²⁶ Rumadi, *Masyarakat Post Teolog: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 72

¹²⁷ Martin Chen, *Teologi Gustavo Gutierrez*, h. 32

¹²⁸ Mateus Mali, "Gutierrez dan Pembebasan", dalam *Jurnal: Orientasi Baru*, No.1 Vol. 25 (April 2016)

¹²⁹ Richard J. Mouw. Dipilih untuk sebuah Misi Global: Panggilan menuju Agenda Reformed yang Lebih Luas dalam Gustavo Gutierrez. *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation*, (Maryknoll: Orbis Books, 1973), h.206.

¹³⁰ Gustavo Gutierrez, *A Theology of Liberation: History*, h. 206.

Gutierrez berpendapat, gereja adalah arah menuju pembebasan kepada yang tertindas dan menjadi miskin supaya dapat mengambil bagian di dalam solidaritas dengan mereka yang menderita. Hanya dengan berpartisipasi di dalam perjuangan mereka kita dapat mengerti implikasi-implikasi pesan Injil dan membuatnya memiliki dampak di dalam sejarah. Selanjutnya Gutierrez mengatakan, harus memberikan suara kenabian. Salah satu cara gereja supaya dapat memperjelas posisinya sehubungan dengan isu-isu sosial adalah dengan pelayanan kenabian, yang mencakup kritik atas ketidakberesan yang terjadi di dalam masyarakat dan gereja.¹³¹

Gutierrez sendiri yakin bahwa gereja untuk orang miskin (Church for the poor) adalah dasar bagi keberadaan gereja itu sendiri dan basis teologi itu sendiri ketika berefleksi kritis. Bagi Gutierrez gereja yang masuk dalam kehidupan orang miskin, berarti masuk ke dalam dunia yang diwarnai kelaparan, pengangguran, gaji kecil, penghisapan tenaga, rumah yang tidak layak, sarana kesehatan dan pendidikan yang minim.¹³²

4. Refleksi Teologis: Gereja sebagai Ruang Pembebasan kepada Kemiskinan

Partisipasi gereja adalah ruang untuk mewujudkan keadilan. Gereja memanggil setiap warganya untuk memiliki rasa solidaritas dengan yang lain yang menghadapi tantangan untuk menemukan tatanan sosial dan politik hingga terwujud dalam tindakan nyata. Dalam sidang CCA ke-7 tahun 1981 dengan tema “Hidup di dalam Kristus bersama Rakyat” (Living in Christ with People), menegaskan tentang karakter teologi politik Kristen. Dengan mengatakan:

Kehidupan di dalam Kristus bersama rakyat mengandung arti perlu bersama memperhatikan pertanyaan bagaimana dan apa bentuk bahwa kita memberi pengharapan dalam hidup politik masyarakat kita. Pertanyaan tersebut merupakan karakter dari teologi kita, tentang dimensi etis dari kekuasaan dan hidup politis, tentang evaluasi teologis terhadap ideologi-ideologi, budaya-budaya, dan visi-visi politik, dan bentuk tatanan sosial menuju yang ingin kita kerjakan.¹³³

Dari sini jelas bahwa teologi politik menyentuh dimensi etis dari kekuasaan dan kehidupan politik, evaluasi atasnya dan tentang tatanan sosial yang diharapkan menuju visi ke depan dengan mengusahakan sesuatu yang baru, terbuka, dan adil bagi seluruh manusia.

Robinson Rajagukguk menjelaskan, pada konsili Vatikan II dalam deklarasi *nostra Aetate* menganjurkan, agar gereja melindungi dan memajukan bersama-sama keadilan sosial, nilai-nilai moral serta perdamaian dan kebebasan bagi semua orang.¹³⁴ Preman Niles mengatakan tugas teologis adalah esensi refleksi iman Alkitabiah dalam konteks sejarah aktual dan pengalaman dalam pilihan politik di konteks tertentu. Teologi muncul dari sebuah pilihan untuk merespon realitas. Dari sebuah pilihan tersebut, kita mulai membangun visi politik dan program politik. Dalam hal ini, posisi ini menegaskan fakta bahwa sebuah teologi yang netral adalah tidak mungkin. Semua teologi memiliki *bias* masing-masing. Fokus kita bukan hanya urusan internal gereja, tetapi secara luas melingkupi urusan rakyat, juga mengeksplorasi *bias* ideologi dalam teologi yang mencoba mengklaim memberi perhatian terhadap rakyat. Dengan begitu di satu sisi, terdapat sebuah proses mengafirmasi pembebasan dan

¹³¹ Gustavo Gutierrez, “Option for the Poor” In *Mysterium Libertionis: Fundamental Concepts Liberation Theology*, (New York: Orbis Books, 1993), h. 235.

¹³² Bryan S. Myres, *Walking with The Poor*, (New York: Orbis Books, Maryknoll, 2011), h. 143.

¹³³ Asosiasi Teolog Indonesia dalam buku, h. 93

¹³⁴ Penjelasan Robinson Rajagukguk dalam Seminar Paskah 2022 GMI Siloam Binjai dengan Tema: Pekabaran Injil Menurut Perjanjian Baru di Era Teknologi Digital (Metaverse)

penyelamatan atas ciptaan Allah. Dengan kata lain Niles berkata, semua teologi adalah teologi politis, tetapi tidak semua teologi politik adalah teologi yang baik.¹³⁵

Selanjutnya dari segi teologis, Injil Lukas menekankan tindakan kerajaan Allah pada “hari ini”. Dalam Lukas 4:21, yang sering disebut khotbah perdana Yesus, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Kata “hari ini” (Yun. *Semeron*) sering digunakan Lukas (Luk. 2:11; 6:26, 9:23; 19:5,10; 23:42), memperlihatkan bahwa kabar baik/pembebasan itu harus diperlihatkan dan diterima menjadi satu tindakan nyata pada hari ini.¹³⁶ Mengikuti jejak pelayanan Yesus, kita harus berpijak dengan yang miskin dan berupaya mentransformasikan hidup mereka di dunia dan dengan cara demikian menghadirkan pemerintah Allah setiap hari.

Selanjutnya, jalan mengikuti rencana Allah adalah adanya perjuangan mengatasi kemiskinan. Matius 25:31-46 menekankan bahwa panggilan terakhir merupakan evaluasi terhadap kualitas dan perhatian seseorang dalam mendahulukan orang miskin. Makna dan hakikat pelayanan kepada sesama ditempatkan lebih mendalam. Sebab perlakuan kita kepada sesama pada hakikatnya kita lakukan kepada Kristus.

Pusat perhatian dan keberpihakan Yesus kepada orang miskin ini bertujuan untuk menyatakan keadilan-Nya bagi semua orang. Hal ini tidak dapat dipahami sebagai tindakan pilih kasih Yesus yang lebih mengasihi orang miskin dibandingkan dengan orang kaya. Sesungguhnya ia mengasihi semua orang, tetapi ia lebih memberikan perhatian lebih khusus kepada orang miskin agar pernyataan keadilan-Nya dapat dirasakan dan dialami oleh semua orang. Ide dasar yang ada di balik pelayanan mereka kepada kaum miskin adalah karena Yesus sendiri telah mengidentifikasi diri-Nya dengan mereka yang miskin dan hina dalam masyarakat sebagai saudara-Nya (Mat. 25:40). Pengidentifikasi diri-Nya sebagai tindakan pembebasan-Nya bagi kaum miskin. Oleh karena itu, Ia juga mengharapkan semua orang termasuk komunitas Matius saat itu dapat secara bersama-sama memihak kepada kaum miskin.¹³⁷

Selanjutnya, Matius 25:31-46 sangat menekankan pentingnya penegakan keadilan. Tindakan Yesus untuk menegakkan keadilan adalah suatu tindakan politik yang mencakup prinsip nilai, hukum, dan tindakan moral baik secara pribadi maupun sosial. Keadilan yang ditegakkan oleh Yesus merupakan kecaman atas struktur-struktur sosial yang tidak adil dan menindas. Dalam penghakiman itu, Yesus tidak bertindak seperti hakim sebuah pengadilan dengan sejumlah kasus yang harus dipecahkan. Namun dalam penghakiman terakhir itu, Yesus hadir sebagai hakim dan pembebas yang mempraktikkan keadilan-Nya dengan cara membebaskan manusia dari para penindasan, mengecam segala tindakan yang salah dan tidak adil. Pesan utama yang ditegaskan Yesus dalam aspek keadilan ini adalah keadilan Yesus merupakan keadaan di mana kehendak Allah yang menghendaki agar pretek keadilan selalu ditegakkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menegakkan keadilan adalah

¹³⁵ Niles mengaakan “all theologies are political theologis, but not all political theologis are good theologis” dalam D. Preman Niles, “Story and Theology-A Proposal,” *The East Asian Journal of Theology*, Vol. 4, No. 1, 1985, h. 112.

¹³⁶ Penjelasan Robinson Rajagukguk dalam Seminar Paskah 2022

¹³⁷ Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, “Dasar Teologis bagi Pekerjaan Orang Kristen dalam Masyarakat” (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), h. 92

tindakan dari cinta yang dipraktikkan dalam memperjuangkan pembebasan bagi orang-orang miskin dan menderita.¹³⁸

III. Kesimpulan

Gustavo Gutierrez sebagai teolog pembebasan dari kemiskinan struktural memberikan pemikiran bagi gereja untuk dapat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan. Bagi Gutierrez gereja adalah sebagai tempat untuk berefleksi iman yang hidup bersama dan bagi orang yang miskin, tertawan, dan tertindas. Menurut Gutierrez gereja untuk orang miskin (*church for the poor*) menjadi dasar bagi keberadaan gereja sendiri dan basis teologinya ketika berefleksi kritis. Kesadaran akan konteks kemiskinan, kehadiran gereja diantarkan untuk mentransformasi kehidupan masyarakat dari yang bersifat eksklusif menuju sebuah tindakan praxis demi sebuah perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Gereja bukan persekutuan yang hanya membicarakan soal ritual dan doktrin. Kepedulian gereja terhadap masalah kemiskinan adalah sebagai pilihan yang tidak terpisah dari komitmen gereja kepada Yesus Kristus. Gereja hadir untuk menciptakan Kerajaan Allah bagi dunia, berarti bertindak sebagaimana kehadiran Yesus dalam memberikan pembebasan bagi umat manusia. Gereja menjadi jalan pembebasan berarti gereja mesti menjadi gereja yang mendahulukan kaum miskin, yang oleh Gustavo Gutierrez dikatakan dalam hal inilah gereja benar-benar menjadi *church for the poor* (gereja untuk orang miskin).

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi, H. *Ilmu Sosial Dasar*. Malang: Rineka Cipta, 1991.
- Adiprasetya, Joas. "Gereja Pengembara, Gereja Sahabat", dalam Meitha Sartika & Hizkia A. Gunawan, *Ecclesia In Transitu Gereja di Tengah Perubahan Zaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Agussalim. *Mereduksi Kemiskinan. Nala Cipta Litera bekerjasama Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan*. Makassar, Universitas Hasanuddin, 2009.
- Andreas, W. *Manajemen Gereja*. Bandung: Bina media Infomasi, 2010.
- Banawiratma, J.B. *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Brownlee, Malcolm. *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan. "Dasar Teologis bagi Pekerjaan Orang Kristen dalam Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Carter, Warren. *Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading*, The Bible & Liberation series. Maryknoll, N Y: Orbis Book, 2000.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3S, 1983.
- Chen, Martin. *Teologi Gustavo Gutierrez*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Gerrit Singgih, Emmanuel. *Bergereja, Berteologi dan Bermasyarakat*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1997.
- Gutierrez, Gustavo. "Option for the Poor" *In Mysterium Libertionis: Fundamental Concepts Liberation Theology*. New York: Orbis Books, 1993.

¹³⁸ Warren Carter, *Matthew and the Margins: A Sociopolitical and Religious Reading*, The Bible & Liberation series, (Maryknoll, N Y: Orbis Book, 2000), h. 15.

- Gutierrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. London: SCM Press, 2001.
- Jacob, Tom. *Gereja dan Masyarakat*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Kmustofa, Muhammad dan Mulyana W Kusuma. “Ketidakadilan Struktural dan Kedaulatan Hukum” dalam Alfian, dkk, *Kemiskinan Struktural*. Malang: YIS, 1980.
- Magnis Suseno, Franz. “Keadilan dan Analisis Sosial” dalam J.B Banaeiratma (peny), *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Mali, Mateus. “Gutierrez dan Pembebasan”, dalam *Jurnal: Orientasi Baru*, No.1 Vol. 25 April 2016.
- Mouw, Richard J. Dipilih untuk sebuah Misi Global: Panggilan menuju Agenda Reformed yang Lebih Luas dalam Gustavo Gutierrez. *A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation*. Maryknoll: Orbis Books, 1973.
- Nickolof, James B. *Gustavo Gutierrez: Essential Writings*. London: SCM Press, 1996.
- Niftrik, G.C. dan B.J. Boland, *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1967.
- Niles. mengatakan “all theologies are political theologies, but not all political theologies are good theologies” dalam D. Preman Niles. “Story and Theology-A Proposal,” *The East Asian Journal of Theology*, Vol. 4, No. 1, 1985.
- Nuban Timo, Ebenhaizer. *Menuju Gereja yang Mandiri dan Terbuka, Wacana bagi Pembaharuan Jemaat*. Kupang: Gita Kasih, 2009.
- Panjaitan, Merphin. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Putranta, C. *Gereja Kaum Miskin dalam Konsisli Vatikan II dan Dokumen Federasi Konfrensi Unskup-Unskup Asia* dalam Tulisan J.B. Banawiratma. *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Rajagukguk, Robinson. dalam Seminar Paskah 2022 GMI Siloam Binjai dengan Tema: Pekabaran Injil Menurut Perjanjian Baru di Era Teknologi Digital (Metaverse)
- Rajekiningi, Tri Wahyu. “Indifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural” dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12, Nomor 1, Juni 2011*
- Rumadi. *Masyarakat Post Teolog: Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Bekasi: Gugus Press, 2002.
- S. Myres, Bryan. *Walkng with The Poor*. New York: Orbis Books, Maryknoll, 2011.
- S. Wilar, Abraham. dkk. Asosiasi Teolog Indonesia dalam buku, *Ziarah Iman Ziarah Politik: Sketsa-sketsa Teologi Politik Kekinian*. Jakarta: Grafika KreasIndo, 2020.
- Selo dkk, Soemardjan (ed). *Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Sangkala Pulsar, 1980.
- Suryawasita. *Analisis sosial* dalam Tulisan J.B. Banawiratma. *Kemiskinan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1987
- Warsito, Rukmadi. *Birokrasi dan Kemiskinan di Indonesia*. Salatiga: Bina Darma, 1993.